



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN**

Alamat : Jalan Sintang – Pontianak KM. 18
SUNGAI UKOI 78655

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KANTOR CAMAT SUNGAI TEBELIAN**



TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN

Jalan Sintang-Pontianak KM 18
SUNGAI UKOI - 78651

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TEBELIAN
NOMOR: 900/ 34 / KEP-KEC.TEBELIAN/2019**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2016-2021**

CAMAT SUNGAI TEBELIAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan b diatas, serta untuk mewujudkan Pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab dalam upaya memantapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Tebelian maka dipandang perlu menetapkan kembali penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Tebelian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembngunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

17. Keputusan ...

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

- .Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 -2021
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana Alat Ukur, yang untuk digunakan oleh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

KETIGA ...

- KETIGA** : Setiap Seksi pada Kecamatan Sungai Tebelian Wajib dilibatkan dalam Penyusunan Data Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur Tugas yang berdasarkan beban kerja
- KEEMPAT** : Dalam Rangka untuk meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Keputusan Camat Sungai Tebelian, Sekretaris Kecamatan diberi tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian Kinerja setiap kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021 dengan lampiran Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dapat diadakan perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Sungai Ukoi
Pada Tanggal Juni 2019

CAMAT SUNGAI TEBELIAN

BERNHAD SARAGIH

Tembusan Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TEBELIAN**
NOMOR : 060/ 1008 /KEP-KEC.TEBELIAN/2019
TANGGAL : Juni 2019
TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN**
TAHUN 2016 – 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
TAHUN 2016 - 2021

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Sungai Tebelian
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan pembangunan
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

- j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

4. **Visi** : **“ Terwujudnya Kecamatan Sungai Tebelian Yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Secara Profesional”**

5. **Misi** :
1. Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administrasi dalam mendukung pelayanan Publik secara profesional.
 2. Membina, dan mengkoordinasikan memfasilitasi penyelenggaran pemerintah Desa dalam menunjang pelayanan publik secara profesional.
 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan publik dan kebijakan masyarakat dalam pelayanan administrasi.
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum didalam program peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan.
 5. Mengoptimalkan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5	6
1	<i>Tercapainya prosedur sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Tata Laksana Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik.</i>	1.	Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Sungai Tebelian	Sekretariat, Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Melaksanakan Pelayanan kepada Aparatur dan Publik	Registrasi Tata Usaha
		2.	Tersedianya Penyediaan Biaya Jasa Listrik	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	2. Terpenuhinya Jasa Listrik 1 Tahun	Laporan Kegiatan Biaya Jasa Listrik
2	<i>Meningkatkan Kinerja Aparatur dalam pelayanan Administrasi dan pelayanan Publik</i>	3.	Tersedianya Kebersihan kantor, gedung serbaguna, rumah dinas jabatan camat	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	3. Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Kegiatan Kebersihan Kantor, Gedung, Rumah Dinas
		4.	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	4. Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Pengurus Barang
		5.	Tersedianya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	5. Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Barang Cetak dan Penggandaan
		6.	Tersedianya Penambahan Jaringan Listrik Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	6. Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Kegiatan Penambahan Jaringan Listrik Kantor
		7.	Tersedianya Penyediaan Komsumsi Makanan dan Minuman Rapat	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	7. Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Kegiatan Pelasanaan Konsumsi Makanan dan Minuman

3	Terlaksananya Program Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Aparatur dengan SKPD	8.	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah dan Keluar Daerah	Sekretariat, Kasubbag, Kasi	8.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Hasil Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
4	Terpenuhinya Jumlah Kualitas Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Publik	1.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	1.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil pemeliharaan barang unit
5	Terpenuhinya Jumlah Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan Sungai Tebelian	2.	Terpeliharanya Peralatan AC Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	2.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil pemeliharaan barang unit
6	Terlaksananya Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik	3.	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	3.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Kegiatan Jasa Perizinan Kendaraan Operasional
		4.	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Komputer	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	4.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Laporan Pengurus Barang
		5.	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	5.	Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Hasil Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor
		6.	Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Rumah Dinas Jabatan Camat, Sekcam, dan Kasi	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	6.	Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Hasil Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Rumah Dinas
		7.	Pembangunan fasilitas ruangan yang mendukung pelayanan publik : Kantor Camat, Rumah Camat, Rumah Sekcam, Kantor Pelayanan Umum, Grasi, Pagar, Taman dll	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	7.	Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Hasil Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kantor Camat

		8.	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Serbaguna	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	8.	Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Hasil Kegiatan Rehabilitasi Gedung Serbaguna
7	<i>Peningkatan Kinerja Aparatur Pelayan Administrasi dan Pelayanan Publik</i>	1.	Terlaksananya kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	1.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Hasil Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kantor Camat Sungai Tebelian
		2.	Terlaksananya keperluan Perangkat Sound System	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	2.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Pengurus Barang
		3.	Terpenuhinya Penyediaan Podium untuk Rapat dan Pertemuan	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	3.	Untuk Menunjang Pelayanan Publik	Registrasi Pengurus Barang
		4.	Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Seragam Olah Raga	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	4.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Pengurus Barang
		5.	Terlaksananya Penyediaan Dokumen laporan SAKIP dan LAKIP	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	5.	Penyediaan Dokumen SAKIP dan LAKIP Laporan Tahunan Camat	Laporan dokumen SAKIP dan LAKIP
		6.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RENSTRA dan RENJA	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	6.	Penyediaan Dokumen RENSTRA dan RENJA , Laporan Tahunan Camat,	Laporan dokumen RENSTRA dan RENJA
		7.	Terpenuhinya kebutuhan Kursi dan Meja Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	7.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Pengurus Barang
		8.	Terpenuhinya kebutuhan Barang Elektronik Kantor	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	8.	Untuk Menunjang Kinerja Aparatur Pegawai	Registrasi Pengurus Barang

8	Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Banding / Diklat dan Bimtek	9.	Terlaksananya Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kasubbag Aparatur, Keuangan, Program dan Perlengkapan	9.	Untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan hasil Bimtek/Diklat
9	Meningkatnya Jumlah Kualitas Sarana dan Prasarana Kendaraan Operasional Pelayanan Publik	10.	Tersedianya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	10	Untuk Kinerja Pegawai Menunjang Aparatur	Registrasi Pengurus Barang
		11.	Tersedianya Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda Empat	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	11	Untuk Kinerja Pegawai Menunjang Aparatur	Registrasi Pengurus Barang
		12.	Terpenuhinya Penyediaan BBM Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dinas Camat	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	12	Untuk Kinerja Camat Menunjang	Registrasi Pengurus Barang
10	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa.	1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Ketua BPD serta Perangkat Desa	Kasi Pemerintahan	1.	Pelaksanaan Pemilihan Kades dan BPD serta Perangkat Desa	Laporan Hasil Pemilihan Kades, dan Ketua BPD serta Perangkat Desa
		2.	Terlaksananya penyelesaian masalah Batas antara Desa	Kasi Pemerintahan	2.	Pelaksanaan penyelesaian Batas antara Desa	Laporan hasil monitoring dan investigasi penyelesaian batas antar desa
11	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparat Desa	Kasi Pemerintahan	3.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa	Laporan hasil Bimtek/Diklat
12	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Penduduk dan Administrasi ADD Pemerintah Desa	4.	Terlaksananya penyusunan Administrasi Kependudukan	Kasi Pemerintahan	4.	Untuk Menguukur penerapan standar pelayanan publik	Laporan hasil Registrasi pelayanan administrasi kependudukan

		5.	Terlaksananya Penyusunan Administrasi Pengelolaan ADD	Kasi Pemerintahan	5.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Aparatur Perangkat Desa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD
		6.	Terselenggaranya Rakor Kades dan BPD	Kasi Pemerintahan	6.	Terpenuhinya Pengelolaan laporan di bidang Desa	Laporan hasil evaluasi kinerja Kades, BPD, dan perangkat Desa
13	<i>Terlaksananya Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Desa</i>	1.	Terselenggaraanya Pembinaan ketentraman dan ketertiban	Kasi Trantib dan Linmas	1.	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Laporan hasil pembinaan kepada masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban di lingkungan Desa
		2.	Terselenggaranya Pembinaan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kasi Trantib dan Linmas	2.	Meningkatkan peran Satlinmas desa dalam menyelesaikan masalah pengaduan yang ada di masyarakat	Laporan hasil pengaduan dari masyarakat desa
		3.	Terlaksananya Sosialisasi tentang pembentukan FKB tingkat kecamatan	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	3.	Memberikan Sosialisasi dan Pembentukan FKB di Kecamatan	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		4.	Terlaksananya pembinaan dan perlindungan masyarakat	Kasi Trantib dan Linmas	4.	Memberikan Sosialisasi dan Pembinaan Perlindungan bagi Masyarakat	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		5.	Terlaksananya Penertiban Perizinan	Kasi Pelayanan Umum	5.	Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembinaan terhadap tempat usaha	Laporan hasil monitoring pembinaan terhadap tempat usaha
		6.	Terlaksananya Perlombaan Desa	Kasi Ekonomi Pembangunan	6.	Memberikan partisipasi kepada masyarakat dalam mengikuti perlombaan	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan

14	Meningkatnya Sinkronisasi dalam Pembinaan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat	7.	Terlaksananya pembinaan PKK dan Karang Taruna	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	7.	Meningkatnya Kinerja PKK Desa dan peran serta Karang Taruna dalam pembangunan Desa	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		8.	Terlatihnya Kegiatan Paskibraka	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	8.	Tercapainya hasil Kegiatan Paskibraka	Laporan hasil seleksi utusan pengiriman paskibraka
		9.	Terdatanya pendataan Penanggulangan Masalah Sosial	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	9.	Mengurangi penyakit masyarakat	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		10.	Terlaksananya Wewang Senentang Generasi Muda dapat mencintai Budaya Seni	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	10	Tersedianya utusan dalam pengiriman POR, Gawai Dayak, dan Seni Budaya Pelajar	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		11.	Tercapainya raskin Dan BLT tepat sasaran dan terciptanya kehidupan sosial yang baik	Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat.	11	Terlaksananya Kartu Pintar tepat sasaran dan meningkatkan perekonomian rakyat tepat sasaran	Laporan hasil Pembinaan dan monitoring kartu sehat /kartu pintar
		12.	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Kasi Ekonomi Pembangunan	12	Meningkatkan pemerataan pembangunan masyarakat Desa disektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran	Rekapitulasi hasil kegiatan musrenbang
		13.	Terbinanya petani dan terselesainya permasalahan pembangunan perkebunan dan pertanian	Kasi Ekonomi Pembangunan	13	Terciptanya stabiilitas masyarakat dalam meningkatkan pengurangan konflik antar masyarakat dan perusahaan	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan

		14.	Terlaksananya Bimbingan/ Monitoring dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Ekonomi	Kasi Ekonomi Pembangunan	14 .	Terciptanya peningkatan terhadap pembangunan ekonomi dalam pengembangan masyarakat Desa bagi pengusaha UKM dan usaha Lainnya	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		15.	Optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan sarana dan prasarana	Kasi Ekonomi Pembangunan	15 .	Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kepentingan pelayanan publik	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		16.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak	Kasi Ekonomi Pembangunan	16 .	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan pajak PBB-P2	Laporan hasil rekapitulasi pembayaran pajak PBB- P2
		17.	Tersusunnya bank data dibidang ekonomi dan pembangunan	Kasi Ekonomi Pembangunan	17 .	Terlaksananya Pengelolaan data di bidang ekonomi dan pembangunan	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan

15	<i>Terlaksananya Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kecamatan Sungai Tebelian</i>	18.	Tertibnya perizinan bagi pengusaha	Kasi Pelayanan Umum	18 .	Terdatanya perijinan kepada pengusaha UKM dan Usaha lainnya	Registrasi Pembuatan Perizinan bagi Pengusaha
		19.	Tercapainya lingkungan kantor yang bersih dan indah	Kasi Ekonomi Pembangunan	19 .	Terlaksananya Pembangunan dan Sanitasi Taman Kantor	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan
		20.	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap akan pentingnya izin usaha	Kasi Ekonomi Pembangunan	20 .	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha dalam mendirikan suatu bisnis / usaha	Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan

CAMAT SUNGAI TEBELIAN

BERNHAD SARAGIH

